

**TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN & SOSIAL DALAM PENGELOLAAN  
PARIWISATA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI TERHADAP  
PARIWISATA BERBASIS ALAM DAN KONFLIK MANUSIA–MONYET EKOR  
PANJANG (MACACA FASCICULARIS) DI KALURAHAN GIRITIRTO,  
KAPANEWON PURWOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Naszwa Zakira, Ahmad Zaini Maulana, Ibrahim Jabir**

*Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia*

Email: [naszwazakira.1119@gmail.com](mailto:naszwazakira.1119@gmail.com), [zainimaulana308@gmail.com](mailto:zainimaulana308@gmail.com), [mibrahimjabir177@gmail.com](mailto:mibrahimjabir177@gmail.com)

**Abstract**

*This study examines environmental and social responsibility in nature-based tourism management through the perspective of maqashid sharia, focusing on the conflict between humans and long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Kalurahan Giritirto, Gunungkidul Regency. The development of tourism in the Gunungsewu karst area has contributed to local economic growth but has also increased ecological pressure and intensified human-wildlife conflicts due to habitat disruption. This research aims to analyze how the human-macaque conflict reflects weak Environmental and Social Responsibility (ESR) practices in tourism governance and to evaluate such conditions through the concept of hifz al-bi'ah in maqashid sharia. This study uses a qualitative descriptive socio-legal approach with secondary data collected from policy documents, conservation reports, academic publications, and related literature. The findings show that tourism management in Giritirto has not adequately integrated ecological sustainability and social protection. From the maqashid sharia perspective, such conditions contradict the principles of hifz al-bi'ah, la dharara wa la dhirara, and khalifah fil ardh. Therefore, tourism governance should prioritize ecological justice, habitat protection, community participation, and sustainable environmental management.*

**Keywords: Environmental and Social Responsibility; maqashid sharia; nature-based tourism; human–wildlife conflict.**

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam melalui perspektif maqashid syariah dengan fokus pada konflik manusia dan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di Kalurahan Giritirto, Kabupaten Gunungkidul. Perkembangan pariwisata di kawasan karst Gunungsewu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga meningkatkan tekanan ekologis akibat terganggunya habitat satwa liar. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konflik manusia–monyet merefleksikan lemahnya implementasi Environmental and Social Responsibility (ESR) dalam tata kelola pariwisata serta mengevaluasinya melalui konsep hifz al-bi'ah dalam maqashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan konservasi, publikasi ilmiah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Giritirto belum sepenuhnya mengintegrasikan keberlanjutan ekologis dan perlindungan sosial masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip hifz al-bi'ah, la dharara wa la dhirara, dan khalifah fil ardh. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata perlu diarahkan pada perlindungan habitat, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan berbasis keadilan ekologis.*

**Kata Kunci: Environmental and Social Responsibility; maqashid syariah; pariwisata berbasis alam; konflik manusia–satwa.**

## PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis alam (*nature-based tourism*) berkembang menjadi salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan karst Gunungsewu yang memiliki bentang alam pantai, perbukitan, dan gua alam mendorong pertumbuhan destinasi wisata secara masif serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat lokal.<sup>1</sup> Namun, ekspansi pariwisata yang tidak disertai tata kelola ekologis yang memadai juga memunculkan berbagai persoalan lingkungan, seperti perubahan tata guna lahan, tekanan terhadap ekosistem kawasan penyangga, dan meningkatnya konflik antara manusia dengan satwa liar.<sup>2</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi sektor pariwisata tidak selalu berjalan seiring dengan keberlanjutan ekologis kawasan wisata.

Salah satu dampak ekologis yang semakin nyata di kawasan Gunungkidul ialah meningkatnya konflik antara manusia dan monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), khususnya di Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari. Kawan monyet yang sebelumnya hidup di kawasan perbukitan karst kini semakin sering memasuki lahan pertanian warga dan merusak komoditas seperti jagung, pisang, dan ketela yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.<sup>3</sup> Konflik ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menunjukkan terganggunya keseimbangan ekosistem akibat menyempitnya ruang hidup satwa yang berbatasan langsung dengan kawasan wisata dan aktivitas manusia. Di sisi lain, *Macaca fascicularis* juga telah berstatus *Endangered* dalam daftar merah IUCN sejak 2022,<sup>4</sup> sehingga paradoks antara kepentingan konservasi dan perlindungan masyarakat lokal menjadi semakin kompleks.<sup>5</sup> Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa konflik manusia–satwa tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan biologis, melainkan berkaitan erat dengan arah dan model tata kelola pariwisata berbasis alam.

Data lapangan dari wilayah Gunungkidul yang bertetangga, khususnya Padukuhan Monggol, Kapanewon Saptosari, memperlihatkan gambaran nyata tentang skala dan dampak konflik ini. Populasi monyet ekor panjang di wilayah tersebut dilaporkan terus bertambah

---

<sup>1</sup>Tiaa, Y., dkk., "Siklus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul," *Journal of Public Policy and Administration Research*, Vol. 2, No. 5, 2024, hlm. 1–14.

<sup>2</sup>Rohani, E. D., dan Y. Purwoko, "Dampak Sosial Pariwisata terhadap Masyarakat Desa Ekowisata Pampang Gunungkidul Menuju Desa Ekowisata Berkelanjutan," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 237–254.

<sup>3</sup>Gunungkidul TV, "Sarasehan Kalurahan Giritirto Menjembatani Konflik Manusia dan Monyet Ekor Panjang," 12 Agustus 2025, diakses dari <https://www.gunungkidultv.id>

<sup>4</sup>International Union for Conservation of Nature (IUCN), *Macaca fascicularis*, The IUCN Red List of Threatened Species 2022, diakses 30 Mei 2026, <https://www.iucnredlist.org/species/12551/199563077>

<sup>5</sup>IUCN Red List, "Macaca fascicularis," International Union for Conservation of Nature, 2022, diakses dari <https://www.iucnredlist.org>.

setiap bulan selama sepuluh tahun terakhir, dan kawanan yang datang menyerang lahan pertanian dalam sekali serangan dapat mencapai ratusan ekor.<sup>6</sup> Kerugian yang dialami petani pun sangat signifikan: hasil panen dapat turun hingga 50 persen, dari yang semula dapat memanen sekitar 100 kg menjadi hanya 50–60 kg per musim panen.<sup>7</sup> Kondisi serupa yang terjadi di Padukuhan Monggol memberikan gambaran kontekstual tentang besarnya tekanan yang dihadapi komunitas petani di kawasan karst Gunungkidul akibat konflik manusia–satwa yang tidak tertangani secara sistemik.

Persoalan tersebut mengindikasikan lemahnya integrasi tanggung jawab lingkungan dan sosial (*Environmental and Social Responsibility/ESR*) dalam pengelolaan pariwisata. Pengembangan wisata yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali belum diimbangi dengan kajian daya dukung ekologis, perlindungan habitat satwa, maupun mekanisme mitigasi bagi masyarakat terdampak. Penelitian mengenai pariwisata berkelanjutan menunjukkan bahwa absennya pengelolaan ekologis yang partisipatif berpotensi menghasilkan eksternalitas negatif yang justru ditanggung komunitas lokal di sekitar destinasi wisata.<sup>8</sup> Dengan demikian, konflik manusia–monyet di Giritirto dapat dipahami sebagai indikator lemahnya tata kelola ekologis pariwisata sekaligus kegagalan distribusi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terdampak.

Konsep *hifz al-bi'ah* dalam maqashid syariah menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari upaya menjaga kemaslahatan kehidupan.<sup>9</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi, termasuk sektor pariwisata, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keberlanjutan ekosistem maupun menimbulkan mudarat bagi masyarakat sekitar. Sejumlah kajian kontemporer bahkan mulai menempatkan *hifz al-bi'ah* sebagai maqashid syariah kontemporer yang relevan dalam menjawab krisis ekologis dan pembangunan berkelanjutan di era modern.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Redaksi TV9, "Mahasiswa KKN UIN SUKA Fasilitas Petani Monggol Atasi Gangguan Monyet Ekor Panjang," Jurnal9.tv, 3 Agustus 2025, diakses dari <https://jurnal9.tv/mahasiswa-kkn-uin-suka-fasilitas-petani-monggol-atasi-gangguan-monyet-ekor-panjang/>.

<sup>7</sup>Redaksi Jogja Voice, "Ketika Hutan Bergeser, Monyet Ekor Panjang Meneror Ladang: Suara Petani dari Kacamata Mahasiswa KKN," JogjaVoice.com, 12 Agustus 2025, diakses dari <https://jogjavoice.com/berita-lokal-jogja/ketika-hutan-bergeser-monyet-ekor-panjang-meneror-ladang-suara-petani-dari-kacamata-mahasiswa-kkn/>.

<sup>8</sup>Rusyidi, B., dan M. Fedyansyah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat," Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1, No. 3, 2018, hlm. 155–165.

<sup>9</sup>Haqiqi, A. F., "Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi'ah dalam Mengatasi Krisis Ekologi di Indonesia," SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 1–18.

<sup>10</sup>Basri, R. G. M., "Hifz al-Bi'ah sebagai Maqashid Syariah Kontemporer," Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 8, No. 2, 2026, hlm. 2211–2225.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana konflik manusia–monyet ekor panjang merefleksikan lemahnya tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam di Kalurahan Giritirto; dan (2) bagaimana praktik pengelolaan tersebut dievaluasi melalui perspektif maqashid syariah, khususnya *hifz al-bi'ah*.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep *Environmental and Social Responsibility* (ESR), konflik manusia–satwa liar, dan maqashid syariah dalam satu kerangka analisis pengelolaan pariwisata berbasis alam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti aspek ekonomi pariwisata atau konservasi satwa secara terpisah, penelitian ini menempatkan konflik manusia–monyet ekor panjang sebagai indikator kegagalan tata kelola ekologis pariwisata sekaligus mengevaluasinya melalui perspektif *hifz al-bi'ah* dalam maqashid syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap studi konflik manusia–satwa di kawasan wisata, tetapi juga menawarkan kerangka normatif berbasis nilai Islam dalam pengembangan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang berkeadilan ekologis dan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*) terhadap pengelolaan pariwisata berbasis alam dan konflik manusia–*Macaca fascicularis* di Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini juga bersifat *socio-legal* karena memadukan analisis tata kelola lingkungan dan pendekatan normatif maqashid syariah dalam mengevaluasi praktik pengelolaan pariwisata berbasis alam. Dengan desain ini, Kalurahan Giritirto diperlakukan sebagai unit analisis tunggal yang representatif untuk mengkaji problematika tata kelola pariwisata berbasis alam sekaligus mengevaluasinya dalam perspektif *Environmental and Social Responsibility* (ESR) dan maqashid syariah.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memanfaatkan dominan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi (*documentary research*). Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada evaluasi tata kelola dan tanggung jawab lingkungan berbasis dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, publikasi akademik, serta data monitoring yang

telah tervalidasi. Sumber data yang digunakan mencakup lima kategori utama. Pertama, data monitoring populasi *M. fascicularis* dari BKSDA Yogyakarta periode Juni 2023-Agustus 2024. Kedua, data serangan satwa dan lahan terdampak dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2022. Ketiga, dokumen hasil Sarasehan Strategi Penanganan Monyet Ekor Panjang dan Ketahanan Pangan Kalurahan Giritirto yang diselenggarakan pada 12 Agustus 2025. Keempat, publikasi ilmiah, laporan lembaga, dan pemberitaan media terverifikasi yang berkaitan dengan pariwisata Purwosari dan dinamika konflik manusia-satwa di Gunungkidul. Kelima, literatur maqashid syariah dan kajian ESR pariwisata yang relevan sebagai landasan analisis normatif.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*) yang mencakup tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>11</sup> Evaluasi terhadap praktik tata kelola pariwisata dilakukan menggunakan kerangka ESR yang mencakup dua dimensi utama, yaitu: (1) dimensi ekologis, meliputi kajian daya dukung lingkungan, zonasi habitat satwa, dan pengelolaan dampak fisik pariwisata; serta (2) dimensi sosial, meliputi mekanisme kompensasi komunitas, partisipasi warga dalam perencanaan, dan penanganan dampak terhadap mata pencaharian petani. Temuan empiris selanjutnya dievaluasi secara normatif menggunakan kerangka maqashid syariah melalui tiga lapis analisis, yaitu konsep *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), kaidah *la dharara wa la dhirara* (larangan menimbulkan bahaya), dan prinsip *khalifah fil ardh* (tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi).

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder dan belum mencakup observasi lapangan maupun wawancara secara langsung dengan masyarakat terdampak dan pengelola wisata. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih diarahkan pada evaluasi konseptual dan tata kelola kebijakan dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dinamika Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam Di Kalurahan Giritirto**

---

<sup>11</sup>Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: SAGE Publications, 2014).

Perkembangan pariwisata alam di Kabupaten Gunungkidul dalam satu dekade terakhir menunjukkan perubahan orientasi pembangunan daerah yang semakin bertumpu pada sektor wisata berbasis alam. Kawasan karst Gunungsewu yang memiliki bentang pantai, perbukitan kapur, dan panorama alam menjadi daya tarik utama pertumbuhan destinasi wisata di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>12</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 3 juta kunjungan. Peningkatan tersebut mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Purwosari, termasuk Kalurahan Giritirto, melalui sektor perdagangan, jasa wisata, rumah makan, dan usaha mikro di sekitar kawasan wisata. Akan tetapi, ekspansi sektor pariwisata lebih banyak diarahkan pada peningkatan nilai ekonomi kawasan dibandingkan penguatan perlindungan ekologis. Pembangunan fasilitas wisata yang terus meningkat secara perlahan mengurangi vegetasi alami dan mempersempit ruang hidup satwa liar di kawasan karst. Situasi ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pariwisata belum sepenuhnya diikuti tanggung jawab lingkungan yang memadai. Dalam konteks *Environmental and Social Responsibility* (ESR), pembangunan wisata seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem dan melindungi masyarakat yang terdampak perubahan lingkungan.<sup>13</sup>

Meningkatnya aktivitas pariwisata di kawasan Purwosari mendorong terjadinya perubahan tata ruang dan pemanfaatan lahan di wilayah karst Gunungsewu. Pembangunan akses jalan, tempat usaha, area parkir, dan fasilitas wisata lainnya menyebabkan sebagian kawasan vegetasi alami berubah menjadi ruang ekonomi dan infrastruktur penunjang wisata.<sup>14</sup> Kajian Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa pembangunan di kawasan karst berpotensi memicu fragmentasi habitat dan penurunan kualitas lingkungan apabila tidak disertai pengendalian ekologis yang memadai. Dalam praktiknya, pembangunan wisata di kawasan karst sering kali lebih menekankan percepatan ekonomi dibandingkan kajian daya dukung lingkungan. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan wajib memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Akibatnya, perubahan tata ruang di kawasan Giritirto tidak hanya mengubah

---

<sup>12</sup>Endy Marlina, "Geotourism as a Strategy of Geosite Empowerment towards the Tourism Sustainability in Gunungkidul Regency, Indonesia," *International Journal of Smart Home* Vol. 10, No. 5 (2016): 131–148.

<sup>13</sup>Ahmad Baiquni, *Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 63.

<sup>14</sup>Rudi Hartono dan Budi Sumaryono, "Land Use Conflicts in the Gunungkidul Karst Area," *Journal of Regional and Urban Development* Vol. 16, No. 1 (2020): 47–56.

struktur fisik wilayah, tetapi juga mengganggu stabilitas ekosistem karst yang menjadi habitat satwa liar. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa kontrol ekologis yang jelas, maka konflik lingkungan akan semakin sulit dihindari. Dalam perspektif maqashid syariah, pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan bertentangan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* karena menghasilkan kerusakan ekologis dan mengurangi kemaslahatan masyarakat sekitar.<sup>15</sup>

Perkembangan sektor pariwisata di Kalurahan Giritirto memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa wisata. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti meningkatnya tekanan terhadap lingkungan kawasan karst. Masyarakat lokal justru menjadi kelompok yang paling rentan menerima dampak ekologis, terutama ketika konflik antara manusia dan monyet ekor panjang mulai meningkat di kawasan pertanian warga. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi pariwisata tidak selalu berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan.

Kawasan karst Gunungsewu merupakan ekosistem yang memiliki karakteristik ekologis khas dengan tingkat sensitivitas lingkungan yang tinggi terhadap perubahan aktivitas manusia.<sup>16</sup> Kawasan ini memiliki sistem hidrologi bawah tanah, vegetasi lahan kering, serta biodiversitas yang menjadi habitat berbagai jenis satwa liar, termasuk monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*). Kondisi tersebut memaksa kawanan monyet mendekati kawasan pertanian dan permukiman masyarakat untuk mencari sumber makanan alternatif. Dengan demikian, konflik manusia dan monyet di Giritirto tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga menyangkut keberlanjutan biodiversitas kawasan karst. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah kerusakan alam akibat eksploitasi yang berlebihan.

## **2. Konflik Manusia–Monyet Ekor Panjang Sebagai Dampak Ekologis Pariwisata**

Perubahan tata ruang dan meningkatnya aktivitas wisata di kawasan karst Gunungsewu menyebabkan interaksi antara manusia dan monyet ekor panjang semakin intensif. Kawanan monyet yang sebelumnya hidup di kawasan perbukitan kini lebih sering memasuki area pertanian dan permukiman warga untuk mencari sumber makanan. Situasi ini terjadi karena sebagian habitat alami satwa mengalami tekanan akibat pembangunan fasilitas wisata dan aktivitas manusia yang terus meningkat. Dalam perspektif ekologis, perubahan perilaku satwa

---

<sup>15</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 45.

<sup>16</sup>UNESCO, *Gunung Sewu UNESCO Global Geopark Report* (Paris: UNESCO, 2021), hlm. 7.

liar merupakan indikator terganggunya keseimbangan habitat. Konflik tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai gangguan satwa terhadap masyarakat, tetapi juga sebagai dampak dari pembangunan wisata yang belum sepenuhnya memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Jika ekspansi wisata terus berlangsung tanpa pengendalian ekologis, maka potensi konflik manusia–satwa di kawasan Giritirto akan semakin meningkat.

Pola kerusakan dan besaran kerugian yang dialami petani akibat serangan monyet ekor panjang di kawasan Gunungkidul konsisten dengan temuan dari wilayah-wilayah yang bertetangga. Di Padukuhan Monggol, Saptosari, yang juga berada di kawasan karst Gunungsewu, petani melaporkan bahwa sekali kawanan monyet datang, jumlahnya bisa mencapai ratusan ekor dan dapat masuk ke lahan meskipun sudah dipasang jaring pelindung. Bahkan ladang yang ditinggal hanya 5–10 menit pun tidak luput dari serangan. Secara sosial, konflik ini telah mengubah struktur keseharian masyarakat petani: mereka terpaksa berjaga bergantian dari subuh hingga magrib, bahkan sebagian warga memilih bermalam di ladang selama musim panen demi melindungi hasil pertanian mereka.<sup>17</sup> Data ini memperkuat argumen bahwa konflik manusia–satwa di kawasan karst Gunungkidul bukan sekadar gangguan sporadis, melainkan tekanan kronis yang melemahkan ketahanan ekonomi dan psikologis komunitas petani lokal.

Konflik antara manusia dan monyet ekor panjang memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Giritirto yang masih bergantung pada sektor pertanian. Kawanan monyet secara rutin merusak tanaman jagung, pisang, ketela, dan berbagai tanaman hortikultura milik warga. Berdasarkan laporan masyarakat dan penelitian konservasi di kawasan Gunungkidul, serangan monyet cenderung meningkat pada musim kemarau ketika sumber pakan alami di kawasan karst mulai berkurang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat lokal menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak ekologis dari pembangunan wisata berbasis alam. Di sisi lain, belum terdapat mekanisme perlindungan dan mitigasi konflik yang memadai bagi masyarakat terdampak. Situasi tersebut menunjukkan lemahnya implementasi *Environmental and Social Responsibility* dalam pengelolaan wisata berbasis alam di kawasan Giritirto.

---

<sup>17</sup>Redaksi Jogja Voice, "Monyet Ekor Panjang Terus Mengancam Panen Petani, 5 Kelompok KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul Upayakan Sosialisasi di Monggol," *JogjaVoice.com*, 8 Agustus 2025, diakses dari <https://jogjavoice.com/berita-lokal-jogja/monyet-ekor-panjang-terus-mengancam-panen-petani-5-kelompok-kkn-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta-dan-dinas-lingkungan-hidup-gunungkidul-upayakan-sosialisasi-di-monggol/>.



Penyempitan habitat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya konflik manusia-monyet di kawasan Giritirto. Faktor ini diperkuat oleh fakta bahwa pembangunan infrastruktur seperti Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), permukiman, dan tempat wisata di kawasan Gunungkidul turut merusak habitat alami monyet ekor panjang, sehingga mendorong kawanan satwa tersebut semakin jauh memasuki wilayah pertanian warga.<sup>18</sup> Perubahan pemanfaatan ruang dan berkurangnya vegetasi alami menyebabkan ruang jelajah satwa semakin terbatas. Kondisi tersebut memengaruhi pola pergerakan monyet ekor panjang yang mulai berpindah menuju kawasan pertanian dan permukiman warga untuk memperoleh sumber makanan baru. Dalam beberapa kasus, kelompok monyet bahkan membentuk pola pergerakan rutin ke lahan pertanian masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan perilaku satwa tersebut menunjukkan bahwa konflik manusia-satwa pada dasarnya merupakan konsekuensi ekologis dari terganggunya keseimbangan habitat. Dengan demikian, penanganan konflik tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif terhadap satwa, tetapi harus disertai upaya pemulihan dan perlindungan habitat secara berkelanjutan.

Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Masyarakat Lokal meningkatnya konflik manusia monyet tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial masyarakat lokal. Ketidakpastian hasil pertanian, meningkatnya kekhawatiran warga, dan terganggunya aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa konflik ekologis dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.<sup>19</sup> Dalam beberapa kasus, masyarakat mulai memandang keberadaan satwa liar sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan tindakan represif terhadap satwa apabila tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang adil dan berkelanjutan.

### **3. Evaluasi *Environmental And Social Responsibility* (ESR) Dalam Pengelolaan Pariwisata**

Konflik manusia-monyet ekor panjang di Kalurahan Giritirto menunjukkan lemahnya implementasi *Environmental and Social Responsibility* (ESR) dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam. Pengembangan wisata di kawasan karst lebih berorientasi pada pertumbuhan

---

<sup>18</sup> Redaksi TV9, "Mahasiswa KKN UIN SUKA Fasilitasi Petani Monggol Atasi Gangguan Monyet Ekor Panjang," *Jurnal9.tv*, 3 Agustus 2025, diakses dari <https://jurnal9.tv/mahasiswa-kkn-uin-suka-fasilitasi-petani-monggol-atasi-gangguan-monyet-ekor-panjang/>

<sup>19</sup> Redaksi Jogja Voice, "Monyet Ekor Panjang Terus Mengancam Panen Petani, 5 Kelompok KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul Upayakan Sosialisasi di Monggol," *JogjaVoice.com*, 8 Agustus 2025, diakses dari <https://jogjavoice.com/berita-lokal-jogja/monyet-ekor-panjang-terus-mengancam-panen-petani-5-kelompok-kkn-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta-dan-dinas-lingkungan-hidup-gunungkidul-upayakan-sosialisasi-di-monggol/>

ekonomi dibanding perlindungan habitat satwa dan mitigasi dampak sosial terhadap masyarakat terdampak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola pariwisata belum sepenuhnya mengintegrasikan tanggung jawab ekologis dan sosial secara berkelanjutan. Dalam konteks kawasan wisata Purwosari-Giritirto, kajian ini menjadi sangat krusial mengingat ekosistem karst Gunungsewu yang menjadi basis pengembangan wisata alam sekaligus merupakan habitat utama *Macaca fascicularis* dan berbagai satwa liar lainnya yang terus mengalami tekanan akibat pembangunan wisata. Pembangunan wisata dan perubahan tata ruang menyebabkan penyempitan habitat satwa di kawasan karst.<sup>20</sup>

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan tersebut belum mempertimbangkan secara memadai ambang batas daya dukung ekologis kawasan penyangga habitat satwa. Absennya kajian daya dukung yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan wisata merupakan indikator kegagalan pemenuhan tanggung jawab lingkungan yang mendasar. Ketidadaan mekanisme pengendalian ekologis menyebabkan tekanan lingkungan berlangsung secara kumulatif. Evaluasi terhadap dokumen tata ruang menunjukkan bahwa belum terdapat penetapan kawasan penyangga yang tegas antara destinasi wisata alam dan habitat monyet ekor panjang di kawasan Giritirto. BKSDA Yogyakarta telah mendorong penanganan konflik manusia–satwa melalui kolaborasi lintas sektor, namun realisasinya masih terkendala lemahnya koordinasi antarlembaga serta belum adanya regulasi daerah yang mengintegrasikan perlindungan habitat satwa dalam tata kelola pariwisata berbasis alam.<sup>21</sup>

Evaluasi terhadap tanggung jawab sosial pengelola wisata menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat mekanisme kompensasi resmi bagi petani yang mengalami kerugian akibat konflik manusia–satwa. Tidak terdapat skema asuransi pertanian, bantuan khusus bagi petani terdampak, maupun dana kompensasi ekologis yang bersumber dari sektor wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal menanggung eksternalitas negatif pengembangan pariwisata tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah pun belum membuahkan hasil yang memuaskan masyarakat. Di wilayah Gunungkidul, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul telah menjalankan program stimulus makan berupa pemberian ketela dan pisang kepada kawanan monyet setiap tiga hari sekali sejak tahun 2023–2024. Namun

---

<sup>20</sup>Ismanto, H., "Dinamika Teritorial dan Naluri Liar Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*) di Cagar Alam Pangandaran: Implikasi pada Rekreasi Wisatawan," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 789-801.

<sup>21</sup>Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, "Road to HKAN: Dirjen KSDAE Dorong Kolaborasi Tangani Konflik Monyet Ekor Panjang di Gunungkidul," 4 Agustus 2025, diakses dari <https://bksdajogja.org/read/425/>.

program ini dinilai tidak cukup menyelesaikan akar persoalan. Solusi jangka panjang berupa pembangunan kawasan kebun buah sebagai habitat pengganti baru direncanakan dimulai pada tahun 2026–2027 dengan skema *pilot project*, suatu tenggang waktu yang dirasakan terlalu lama oleh para petani yang menanggung kerugian panen setiap musim.<sup>22</sup> Pernyataan DLH sendiri yang menyebut monyet ekor panjang belum dikategorikan sebagai hama oleh Kementerian Pertanian RI semakin mempersempit ruang kebijakan penanganan, sehingga petani berada dalam kondisi tidak terlindungi secara hukum maupun finansial.

Dimensi partisipasi masyarakat dalam tata kelola pariwisata juga menunjukkan lemahnya implementasi ESR di kawasan ini. Sarasehan penanganan konflik manusia–monyet di Kalurahan Giritirto pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya dialog multipihak, namun forum tersebut masih bersifat reaktif dan belum mencerminkan pelembagaan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pariwisata secara berkelanjutan.

Konflik manusia–monyet ekor panjang di Giritirto merupakan ekspresi nyata dari lemahnya implementasi ESR dalam tata kelola pariwisata berbasis alam di kawasan Gunungsewu. Dari perspektif ESR, konflik ini menunjukkan tiga kegagalan utama secara bersamaan: kegagalan pencegahan karena tidak adanya kajian dampak ekologis yang antisipatif; kegagalan mitigasi karena minimnya perlindungan habitat satwa dan lahan pertanian; serta kegagalan kompensasi akibat tidak tersedianya mekanisme ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Oleh karena itu, reformasi tata kelola yang mencakup regulasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk mencegah eskalasi konflik ekologis di kawasan wisata berbasis alam.<sup>23</sup>

#### **4. Analisis Konflik Manusia-Satwa dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Maqashid syariah pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan. Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) dipandang sebagai bagian penting dari maqashid syariah karena krisis ekologis secara langsung memengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, kerusakan

---

<sup>22</sup>Redaksi Jogja Voice, "Monyet Ekor Panjang Terus Mengancam Panen Petani," *JogjaVoice.com*, 8 Agustus 2025; Redaksi TV9, "Mahasiswa KKN UIN SUKA Fasilitasi Petani Monggol," *Jurnal9.tv*, 3 Agustus 2025.

<sup>23</sup>Saputra, S. A., "5 Fakta Monyet Ekor Panjang di Gunungkidul yang Terancam," *Mongabay Indonesia*, 4 Oktober 2024, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2024/10/04/>.

lingkungan akibat pengelolaan pariwisata yang tidak bertanggung jawab tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga persoalan moral dalam perspektif Islam.<sup>24</sup>

Dalam konteks konflik manusia-monyet ekor panjang di Giritirto, prinsip *hifz al-bi'ah* menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab menjaga keseimbangan ekologis. Penyempitan habitat satwa akibat perubahan tata ruang dan ekspansi wisata menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem karst di kawasan Gunungsewu.<sup>25</sup>

Prinsip *la dharara wa la dhirara* menegaskan bahwa suatu aktivitas tidak boleh menimbulkan mudarat bagi pihak lain. Dalam konteks ini, pengembangan wisata yang memicu kerusakan habitat dan meningkatkan konflik manusia-satwa dapat dikategorikan sebagai bentuk mudarat ekologis dan sosial. Oleh karena itu, pengelola wisata dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mencegah dampak lingkungan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.<sup>26</sup> Penerapan prinsip ini dalam evaluasi tata kelola pariwisata Purwosari-Giritirto menghasilkan penilaian yang kritis: pengembangan destinasi wisata yang menyebabkan penyempitan habitat *Macaca fascicularis* sehingga mendorong kawanan monyet memasuki lahan pertanian warga merupakan bentuk *dharar* yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang mengelola dan mengambil manfaat dari pengembangan wisata memiliki kewajiban syar'i untuk mencegah bahaya tersebut dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat terdampak. Ketidadaan mekanisme ini bukan hanya kelemahan tata kelola, tetapi merupakan pelanggaran terhadap kaidah fikih yang telah diakui secara universal dalam tradisi hukum Islam.

Konsep *khalifah fil ardh* menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada larangan merusak lingkungan, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga keberlanjutan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dan habitat satwa liar. Dalam konteks pariwisata Giritirto, pengelolaan kawasan wisata seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan ekologis kawasan karst Gunungsewu. Tanggung jawab khalifah terhadap lingkungan bersifat aktif, bukan pasif.

---

<sup>24</sup> Haqiqi, A. F., "Perspektif Maqashid Syariah Al-Bi'ah dalam Mengatasi Krisis Ekologi di Indonesia," SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 1-18.

<sup>25</sup> Basri, R. G. M., "Hifz al-Bi'ah sebagai Maqashid Syariah Kontemporer," Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 8, No. 2, 2026, hlm. 2211-2225.

<sup>26</sup> Khuluq, M. dan Asmuni, "Hifz al-Bi'ah as Part of Maqashid al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies, 2025.

Seorang khalifah tidak cukup hanya dengan tidak merusak lingkungan; ia berkewajiban secara aktif menjaga, memulihkan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem yang berada di bawah penguasaannya. Dalam konteks pariwisata Giritirto, ini berarti pengelola wisata tidak cukup dengan sekadar tidak secara langsung membunuh satwa liar; mereka berkewajiban memastikan bahwa aktivitas wisata tidak secara langsung mengancam kelangsungan hidup populasi satwa dan ekosistem yang menjadi habitatnya.

Dalam kerangka maqashid syariah, konflik manusia–monyet di Giritirto menunjukkan kegagalan menjaga kemaslahatan ekologis dan sosial secara bersamaan. Ekspansi wisata tanpa tata kelola ekologis yang memadai telah mendorong penyempitan habitat satwa, meningkatkan gangguan terhadap lahan pertanian masyarakat, serta memunculkan kerugian ekonomi bagi petani lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan ekologis dalam Islam. Integrasi antara ESR dan maqashid syariah menjadi penting dalam membangun tata kelola pariwisata berbasis alam yang berkeadilan. ESR menyediakan kerangka tanggung jawab ekologis dan sosial dalam pengelolaan wisata, sedangkan maqashid syariah memberikan landasan moral dan etis yang relevan dengan konteks masyarakat lokal. Dalam praktiknya, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui perlindungan habitat satwa, mekanisme kompensasi bagi masyarakat terdampak, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Dalam kerangka integrasi ini, prinsip *hifz al-bi'ah* dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam kebijakan pariwisata melalui tiga jalur. Pertama, jalur regulasi, yaitu dengan memasukkan standar perlindungan habitat satwa dan mekanisme kompensasi ekologis dalam peraturan daerah tentang pengelolaan wisata alam. Kedua, jalur kelembagaan, yaitu dengan membentuk forum tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat, lembaga konservasi, dan pengelola wisata dalam satu mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif. Ketiga, jalur kultural, yaitu dengan mendorong internalisasi nilai-nilai *khalifah fil ardh* dan *hifz al-bi'ah* dalam program pendidikan wisata dan dakwah lingkungan di komunitas lokal. Dengan demikian, integrasi ESR dan maqashid syariah tidak hanya menawarkan solusi bagi konflik manusia-monyet yang sudah berlangsung, tetapi juga memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk membangun sistem pariwisata berbasis alam yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial—sebuah triaspirasi yang menjadi inti dari cita-cita pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

## 5. Model Pengelolaan Pariwisata Berbasis Keadilan Ekologis dan Sosial

Dalam praktiknya, pengembangan wisata di banyak daerah di Indonesia masih cenderung berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tanpa disertai penghitungan kapasitas ekologis kawasan. Akibatnya, pembangunan infrastruktur wisata justru mempercepat degradasi lingkungan dan mempersempit habitat satwa liar. Fenomena tersebut terlihat di kawasan Purwosari-Giritirto ketika perluasan akses wisata dan perubahan tata ruang mendorong meningkatnya konflik manusia-monyet ekor panjang akibat terganggunya ruang jelajah satwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan satwa liar semata, melainkan pada model tata kelola wisata yang gagal mengintegrasikan aspek ekologis ke dalam kebijakan pembangunan. Dalam konteks ini, keberhasilan pariwisata sering diukur dari jumlah wisatawan dan peningkatan pendapatan daerah, sementara kerusakan ekologis diperlakukan sebagai dampak sampingan yang dianggap wajar.

Realitas ini sejalan dengan temuan di lapangan dari wilayah Gunungkidul lainnya. Di Padukuhan Monggol, warga telah berupaya secara mandiri mengusir kawanan monyet menggunakan berbagai cara, mulai dari pemasangan jaring, penyalan petasan, meriam karbit, hingga penembakan. Namun seluruh upaya tersebut terbukti hanya bersifat jangka pendek karena monyet ekor panjang dikenal memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan tidak jera terhadap usikan berulang.<sup>27</sup> Pernah ada inisiatif warga mengundang suku Baduy untuk menangkap monyet, dan upaya itu berhasil mengurangi populasi dari ratusan hingga tersisa belasan ekor. Namun tanpa penanganan berkelanjutan dari pihak pemerintah, populasi monyet kembali bertambah dalam waktu singkat.<sup>28</sup> Pola ini memperlihatkan bahwa pendekatan parsial dan reaktif tidak akan pernah cukup; diperlukan tata kelola yang sistemik dan berorientasi jangka panjang.

Tata kelola pariwisata di Kalurahan Giritirto perlu diarahkan pada pendekatan berbasis daya dukung lingkungan (*carrying capacity based tourism governance*). Pengembangan wisata yang tidak memperhatikan kapasitas ekologis kawasan karst telah menyebabkan penyempitan

---

<sup>27</sup> Redaksi TV9, "Mahasiswa KKN UIN SUKA Fasilitasi Petani Monggol Atasi Gangguan Monyet Ekor Panjang," *Jurnal9.tv*, 3 Agustus 2025, diakses dari <https://jurnal9.tv/mahasiswa-kkn-uin-suka-fasilitasi-petani-monggol-atasi-gangguan-monyet-ekor-panjang/>

<sup>28</sup> Redaksi Jogja Voice, "Ketika Hutan Bergeser, Monyet Ekor Panjang Meneror Ladang: Suara Petani dari Kacamata Mahasiswa KKN," *JogjaVoice.com*, 12 Agustus 2025, diakses dari <https://jogjavoice.com/berita-lokal-jogja/ketika-hutan-bergeser-monyet-ekor-panjang-meneror-ladang-suara-petani-dari-kacamata-mahasiswa-kkn/>

habitat satwa dan meningkatkan konflik manusia-monyet ekor panjang di kawasan Purwosari–Giritirto. Karena itu, pengelolaan wisata perlu disertai kajian daya dukung lingkungan secara berkala, penetapan zona perlindungan habitat satwa, pembatasan pembangunan di kawasan sensitif ekologis, serta monitoring dampak lingkungan terhadap habitat satwa liar. Penanganan konflik manusia-satwa di Kalurahan Giritirto tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif terhadap monyet ekor panjang semata. Pendekatan seperti pengusiran, perburuan, atau pemusnahan satwa hanya bersifat jangka pendek dan berpotensi memperburuk ketidakseimbangan ekologis.<sup>29</sup> Selain bertentangan dengan prinsip konservasi, pendekatan represif juga mengabaikan fakta bahwa konflik tersebut dipicu oleh penyempitan habitat akibat aktivitas manusia.

Penanganan konflik manusia-satwa di Kalurahan Giritirto tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif terhadap monyet ekor panjang semata. Konflik tersebut perlu ditangani melalui pendekatan preventif dan restoratif, terutama melalui pemulihan habitat satwa dan pengurangan tekanan ekologis di kawasan karst. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan mekanisme perlindungan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak agar beban ekologis tidak sepenuhnya ditanggung oleh petani lokal. Dengan demikian, mitigasi konflik tidak hanya berorientasi pada perlindungan satwa, tetapi juga pada keadilan ekologis dan sosial dalam tata kelola pariwisata.

Penanganan konflik ekologis di kawasan wisata memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, pengelola wisata, dan lembaga konservasi. Selama ini, penanganan konflik manusia-monyet di Giritirto masih bersifat sektoral dan reaktif sehingga belum mampu menyelesaikan akar persoalan secara berkelanjutan. Karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan dampak ekologis, penyusunan kebijakan mitigasi, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak konflik ekologis.<sup>30</sup>

Nilai maqashid syariah, khususnya *hifz al-bi'ah*, dapat menjadi landasan etis dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam di kawasan Gunungkidul. Prinsip tersebut menekankan bahwa pembangunan wisata harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, perlindungan habitat satwa, serta keadilan bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi moral, tetapi juga sebagai dasar

---

<sup>29</sup>Jatna Supriatna, *Konservasi Primata Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), hlm. 144.

<sup>30</sup>Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* Vol. 18, No. 4 (2008), hlm. 543–571.

dalam membangun kebijakan pariwisata yang lebih berkeadilan ekologis dan sosial.<sup>31</sup> Konflik manusia–monyet ekor panjang di Kalurahan Giritirto menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis alam yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa perlindungan ekologis berpotensi memunculkan konflik sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Karena itu, pengelolaan pariwisata perlu diarahkan pada model yang mengintegrasikan tanggung jawab ekologis, perlindungan masyarakat lokal, dan keberlanjutan habitat satwa. Pendekatan berbasis ESR dan maqashid syariah dapat menjadi kerangka alternatif dalam membangun tata kelola pariwisata yang lebih berkeadilan ekologis dan sosial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik antara manusia dan monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) di Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, merupakan dampak nyata dari lemahnya tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam. Pengembangan pariwisata yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi belum diimbangi dengan perlindungan habitat satwa, pengendalian daya dukung lingkungan, serta mekanisme perlindungan bagi masyarakat terdampak. Akibatnya, penyempitan ruang hidup satwa dan meningkatnya interaksi satwa dengan wilayah pertanian warga menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan sosial, dan ketidakseimbangan ekosistem.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik pengelolaan pariwisata tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. Konflik yang terjadi menunjukkan adanya unsur *dharar* karena menimbulkan mudarat bagi masyarakat sekaligus mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *khalifah fil ardh* yang menuntut manusia untuk menjaga, merawat, dan tidak merusak bumi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga kebijakan konkret. Pertama, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pariwisata Berbasis Ekosistem Karst yang secara eksplisit mewajibkan kajian daya dukung lingkungan (*carrying capacity assessment*) sebelum pembangunan fasilitas wisata baru, sekaligus menetapkan zona penyangga habitat satwa liar yang tidak boleh

---

<sup>31</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 53.



dialihfungsikan. Regulasi ini harus mengintegrasikan mekanisme dana kompensasi ekologis yang bersumber dari retribusi wisata, dialokasikan khusus untuk ganti rugi petani terdampak konflik manusia–satwa serta pemulihan vegetasi kawasan karst. Langkah ini secara langsung menjawab tiga kegagalan ESR yang teridentifikasi kegagalan pencegahan, mitigasi, dan kompensasi sekaligus mewujudkan prinsip *la dharara wa la dhirara* dalam kerangka regulasi formal.

Kedua, pemerintah daerah bersama BKSDA Yogyakarta perlu melembagakan Forum Tata Kelola Kolaboratif Pariwisata–Konservasi di tingkat kalurahan sebagai mekanisme partisipasi masyarakat yang bersifat permanen, bukan sekadar sarasehan reaktif. Forum ini melibatkan perwakilan petani terdampak, pengelola wisata, lembaga konservasi, dan tokoh masyarakat dalam perencanaan, pemantauan dampak ekologis, serta evaluasi kebijakan secara berkala. Pelembagaan forum ini tidak hanya memenuhi dimensi sosial ESR melalui partisipasi komunitas, tetapi juga mengoperasionalkan nilai *khalifah fil ardh* secara kolektif di mana tanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem karst Gunungsewu tidak lagi dipikul secara sepihak oleh masyarakat lokal, melainkan menjadi amanah bersama seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

Ketiga, pelembagaan skema kompensasi dan perlindungan sosial bagi komunitas lokal terdampak konflik melalui pendekatan restoratif. Mengingat penelitian ini menemukan adanya kekosongan regulasi dan ketiadaan mekanisme ganti rugi resmi bagi petani yang mengalami kerugian materiil, Pemerintah Kalurahan Giritirto bersama Pengelola Wisata alam perlu menginisiasi pembentukan Dana Kompensasi Ekologis atau skema Asuransi Mikro Pertanian Berbasis Komunitas. Pembiayaan dana taktis ini dapat diintegrasikan melalui penyisihan persentase tertentu dari retribusi tiket masuk destinasi wisata alam atau dialokasikan secara legal melalui pos pemberdayaan masyarakat dalam Dana Desa. Implementasi kebijakan ini merupakan perwujudan operasional dari kaidah fikih *la dharara wa la dhirara*, yang menegaskan bahwa segala bentuk kerugian (*dharar*) akibat eksternalitas negatif pembangunan pariwisata wajib dipulihkan. Dengan demikian, beban ekologis tidak lagi ditanggung sepenuhnya oleh masyarakat lokal, melainkan didistribusikan secara adil guna menciptakan tata kelola pariwisata yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan ekonomi syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik manusia–monyet ekor panjang di Kalurahan Giritirto tidak dapat dipisahkan dari reformasi menyeluruh

terhadap tata kelola pariwisata berbasis alam di kawasan karst Gunungsewu. Integrasi antara kerangka Environmental and Social Responsibility (ESR) dan nilai-nilai maqashid syariah—khususnya *hifz al-bi'ah, la dharara wa la dhirara*, dan *khalifah fil ardh*—menawarkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berakar pada etika dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, keberlanjutan ekologis kawasan wisata dan kesejahteraan masyarakat lokal bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari satu kewajiban yang sama: menjaga bumi sebagai amanah yang harus diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. A. T. H., Wardhana, W., & Nurvianto, S. (2024). *Pemodelan kesesuaian habitat monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) di kawasan karst Gunung Sewu, Kabupaten Gunung Kidul, DIY* (Skripsi sarjana, Universitas Gadjah Mada). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/244332>
- Alwi Syahrial, M. (2024). Kejahatan lingkungan dalam tinjauan hukum pidana Islam dan nasional: Relevansi konsep hifdzul bi'ah dalam penanggulangan pembakaran liar. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 97–111.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Baiquni, A. (2020). *Pengelolaan pariwisata berkelanjutan*. Gadjah Mada University Press.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. (2025, 4 Agustus). *Road to HKAN: Dirjen KSDAE dorong kolaborasi tangani konflik monyet ekor panjang di Gunungkidul*. <https://bksdajogja.org/read/425/>
- Basri, R. G. M. (2026). Hifz al-bi'ah sebagai maqashid syariah kontemporer. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 8(2), 2211–2225.
- Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan. (2025, 25 Agustus). *Hidup berdamai dengan monyet: Jalan panjang mengurai interaksi negatif manusia-satwa di Yogyakarta*. <https://ksdae.kehutan.go.id>
- Gunungkidul TV. (2025, 12 Agustus). *Sarasehan Kalurahan Giritirto Gunungkidul menjembatani konflik manusia dan monyet ekor panjang*. <https://www.gunungkidultv.id/sarasehan-kalurahan-giritirto-gunungkidul-menjembatani-konflik-manusia-dan-monyet-ekor-panjang/>
- Haqiqi, A. Z., Firmasyah, A. Z., Rahman, A. F., Kurnia, I. F., & Firdaus, R. (2025). Perspektif maqashid syariah al-bi'ah dalam mengatasi degradasi lingkungan krisis ekologi di Indonesia. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 8–24.
- Hartono, R., & Sumaryono, B. (2020). Land use conflicts in the Gunungkidul karst area. *Journal of Regional and Urban Development*, 16(1), 47–56.
- International Union for Conservation of Nature. (2022). *Macaca fascicularis*. IUCN Red List of Threatened Species. <https://www.iucnredlist.org>
- Ismanto, H. (2022). Dinamika teritorial dan naluri liar monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) di Cagar Alam Pangandaran: Implikasi pada rekreasi wisatawan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 789–801.

- Khuluq, M., & Asmuni. (2025). Hifz al-bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*.
- Marlina, E. (2016). Geotourism as a strategy of geosite empowerment towards the tourism sustainability in Gunungkidul Regency, Indonesia. *International Journal of Smart Home*, 10(5), 131–148.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nafisah, E. F., & Sukarniati, L. (2015). Dampak perkembangan pariwisata Kabupaten Gunungkidul terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 13(2), 105–115.
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(1), 63–78. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v10i1.1110>
- Redaksi Jogja Voice. (2025, 8 Agustus). *Monyet ekor panjang terus mengancam panen petani, 5 kelompok KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul upayakan sosialisasi di Monggol*. JogjaVoice.com. <https://jogjavoice.com/berita-lokal-jogja/monyet-ekor-panjang-terus-mengancam-panen-petani-5-kelompok-kkn-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta-dan-dinas-lingungan-hidup-gunungkidul-upayakan-sosialisasi-di-monggol/>
- Redaksi Jogja Voice. (2025, 12 Agustus). *Ketika hutan bergeser, monyet ekor panjang meneror ladang: Suara petani dari kacamata mahasiswa KKN*. JogjaVoice.com. <https://jogjavoice.com/berita-lokal-jogja/ketika-hutan-bergeser-monyet-ekor-panjang-meneror-ladang-suara-petani-dari-kacamata-mahasiswa-kkn/>
- Redaksi TV9. (2025, 3 Agustus). *Mahasiswa KKN UIN SUKA fasilitasi petani Monggol atasi gangguan monyet ekor panjang*. Jurnal9.tv. <https://jurnal9.tv/mahasiswa-kkn-uin-suka-fasilitasi-petani-monggol-atasi-gangguan-monyet-ekor-panjang/>
- Rohani, E. D., & Purwoko, Y. (2020). Dampak sosial pariwisata terhadap masyarakat desa ekowisata Pampang Gunungkidul menuju desa ekowisata berkelanjutan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 237–254. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1853>
- Rusyidi, B., & Fedyansyah, M. (2018). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.
- Saputra, A. S. (2020). *Hifdh al-bi'ah sebagai bagian dari maqashid al-syariah: Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'ah al-Islam* (Tesis magister, UIN Sunan Ampel Surabaya). <https://digilib.uinsa.ac.id/44928>

- Saputra, S. A. (2024, 4 Oktober). *5 fakta monyet ekor panjang di Gunungkidul yang terancam*. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2024/10/04/5-fakta-monyet-ekor-panjang-di-gunungkidul/>
- Sinta, D. G., & Hakim, L. (2022). Studi perilaku harian monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) di obyek wisata Sangeh, Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(10), 1133–1143. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i10.499>
- Supriatna, J. (2019). *Konservasi primata Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tiaa, Y., Syafitri, R., Mulyani, D., & Pratiwi, A. (2024). Siklus pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(5), 1–14.
- United Nations Environment Programme & United Nations World Tourism Organization. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. UNEP & UNWTO.
- United Nations World Tourism Organization. (2018). *Tourism and sustainable development goals – Journey to 2030*. UNWTO.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.